

**ANALISIS AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN
PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA BAGIAN
PERTANIAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

OLEH

**DARWISAH
1705906030023**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**

**ANALISIS AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN
PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA BAGIAN
PERTANIAN KECAMATAN TANGAN-TANGAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

**DARWISAH
1705906030023**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS UTU, MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telp. (0655) 7110535
Laman: www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 02 November 2021


Program Studi : Ekonomi Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini telah menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : DARWISAH
NIM : 1705906030023
Dengan judul : Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tanagn-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Mengesahkan,
Pembimbing


Cici Darmayanti, S.E, M.,Si
NIDN.0025128209

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi





Ika Rahmadani, S.E., M.Si.Ak
NIDN:0013058804



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
KAMPUS UTU, MEULABOH-ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telp. (0655) 7110535
Laman: www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 02 November 2021

Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : DARWISAH
NIM : 1705906030023
Dengan judul : Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tanagn-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian Pada Tanggal 02 November 2021

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Cici Darmayanti, S.E., M.Si
2. Sekretaris : Sari Maulida Vonna, S.E., M.Si.AK
3. Anggota : Linda Rahmazaniati, S.E., M.Si.AK

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ekonomi Akuntansi

Ika Rahmadani, S.E., M.Si, Ak
NIDN. 0105117402

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DARWISAH

NIM : 1705906030023

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, saya menyatakan kesediaan untuk di batalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 02 November 2021

Yang Menyatakan,



Nama Mahasiswa : DARWISAH

NIM : 1705906030023

PERSEMBAHAN

“Dia memberikan hikmah (ilmu yg berguna) kepada siapa yg dikehendaki, barang siapa yang mendapat hikmah itu, sesungguhnya telah mendapat kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal (Q.S.Albaqarah :269)

Muktasar dan Siti Zahara

Kupersembahkan skripsi ini...

Untuk belahan jiwaku bidadari surgaku yang tampamu aku bukanlah siapa-siapa didunia ini, Untuk Pahlawanku, ayahanda ku yang telah mengajarku berjalan dan berjuang menjalani hidup. Ibu... Impian kalian selama ini sudah menjadi kenyataan. Ibunda dan ayahanda.. petuahmu menuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, terimakasih atas kasih sayang mu, kini diriku telah selesai dalam studi sarjana bersama keridhaanmu ya ALLAH

Abang, Kakak dan Adikku

Untuk tali persaudaraan yang tak akan pernah terputus abang Edi, kakak Meri, Abang Umar, Adik Toni, Adik lina, Adik Fikar, Adik Baizawi, Adik Era Dan Adek Ulfa Dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan beribu dukungan Dan semangat buat diriku dalam menyelesaikan tu vas akhirnya ini. Dan hanya karya kecil yang dalam kupersembahkan, maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya. Semonga Allah senantiasa membalas setiap jasa kalian dengan kebaikan...

Sahabat, Teman, Dan Pembimbing

Terimakasihku persembahkan kepada sahabat sejatiku Siti Arfah yang selalu senantiasa bersamaku dari bangku SMA hingga bangku perkuliahan. Dan terimakasihku kepada sahabat-sahabatku kepada Roza, Rahma Dan Sarah Dan Muhammad Fathil (kekasihku) yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan Dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ku ini. Dan terimakasihku kepada dosen pembimbing ibu Cici Darmayanti, SEE., M. Si yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi

Tanpa mereka munginku tidak berada dititik sekarang ini

By Darwisah

TA PENGANTAR



Segala puja dan puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dengan ridha-Nya pula telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”. Shalawat beriring salam kepangkuan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah membuat reformasi total umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jasman J., SE., MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar
2. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
3. Ibu Ika Rahmadani, S.E, M.,Si.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Ibu Sari Maulida Vonna S.E, M.,Si.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
5. Ibu Cici Darmayanti, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banya waktu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan, masukan-masukan, saran serta tidak bosan-bosannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik, atas kesempatan penulis menimba khasanah ilmu di kampus ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, mendoakan, kasih sayang yang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
8. Teman-teman seangkatan, yang telah ikut memberikan saran dan sumbangan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
9. Semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak agar proposal ini menjadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Alue Peunyareng, 08 Oktober 2021

DARWISAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Teuku Umar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DARWISAH
NIM : 1705906030023
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Teuku Umar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya**..

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Teuku Umar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Meulaboh, November 2021
Yang Menyatakan



Nama Mahasiswa : DARWISAH
NIM : 1705906030023

ABSTRACT

Ie Lhob Village is a village that received subsidized fertilizer assistance from the government, with a total of 12 farmer groups with an area of 317 hectares of lowland rice farming land. The number of farmers who received fertilizer assistance from the village fund allocation was as many as 300 farmer families, -. The purpose of this study was to determine the Financial Administration Accountability of the ADD Village Fund Allocation Program in the Agriculture Section of Tangan-tangan District, Southwest Aceh Regency. This type of research is qualitative using interview guidelines. The number of samples or informants in this study were 7 people. Based on the results of the research that has been carried out, it is obtained that the Financial Administration Accountability of the Village Fund Allocation Program (ADD) in the Agricultural Section of Tangan-tangan District, Southwest Aceh Regency seen from the planning, organizing, reporting and budgeting stages is good technically and administratively, but in accountability is still a major obstacle, so it still requires assistance from local government officials, especially the sub-district. Based on the results of interviews, it was found that the informants on planning the allocation of village funds, it can be concluded that the sub-district did not know for sure all about the amount of agricultural assistance, business capital assistance, and others. Because it's all the affairs of the village. The financial arrangements for the allocation of village funds for agriculture are regulated in accordance with the results of village meetings with village officials and the community, if the proposal for new agricultural funds is drawn up, if there is no proposal, then there is no budget. There is no development and capital assistance for farmers because only seeds and fertilizers are provided. The requirement for farmers to get fertilizer and seed assistance is only a photocopy of their KK and KTP.

Keywords: *Accountability, Financial Administration, Village Fund Allocation*

ABSTRAK

Desa Ie Lhob merupakan desa yang mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah, dengan jumlah petani sebanyak 12 kelompok petani dengan luas lahan pertanian padi sawah seluas 317 hektar. Jumlah petani yang mendapatkan bantuan pupuk dari alokasi dana desa adalah sebanyak 300 KK petani,-. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangantangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pedoman wawancara. Jumlah sampel atau informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangantangan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari tahap planning, organizing, reporting dan budgeting sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggung jawaban masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah khususnya pihak Kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa informan pada planning alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak tahu pasti semua tentang jumlah bantuan pertanian, bantuan modal usaha, dan lainnya. Karena itu semua sudah sepenuhnya urusan pihak desa. Pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Administrasi Keuangan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis Ilmiah.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Akutabilitas	8
2.1.1.1 Jenis-jenis kuntabilitas	9
2.1.1.2 Dimensi Akuntabilitas.....	10
2.1.1.3 Indikator Akutabilitas.....	12
2.1.2 Administrasi	12
2.1.2.1 Pengertian Administrasi	12
2.1.2.2 Fungsi Administrasi.....	13
2.1.2.3 Tujuan Administrasi	15
2.1.2.4 Ruang lingkup Administrasi	15
2.1.3 Laporan Keuangan	16
2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	16
2.1.3.2 Tujuan Pembuatan atau Penyusunan Laporan Keuangan	17
2.1.3.3 Keterbatasan Laporan Keuangan.....	19
2.1.4 Alokasi Dana Desa	20
2.1.4.1 Tujuan Alokasi Dana Desa	21
2.1.4.2 Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa	22

2.1.5	Pertanian.....	24
2.1.6	Penelitian Terdahulu	25
2.2	Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2	Informan Penelitian	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	31
3.5	Instrumen Operasional	32
3.6	Definisi Operasional Variabel	33
3.7	Teknik Analisis Data	34
3.8	Ujian Kredibilitas Data.....	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.2	Hasil Penelitian	37
4.2.1	Planning.....	38
4.2.2	Organizing.....	43
4.2.3	Reporting.....	48
4.2.4	Budgeting	53
4.3	Pembahasan Hasil Wawancara	59
4.3.1	Planning.....	59
4.3.2	Organizing.....	60
4.3.3	Reporting.....	61
4.3.4	Budgeting	62
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tangan-Tangan.....	3
1.2 Data Alokasi Dana Desa Bagian Pertanian di Desa Ie Lhob Tahun 2018-2019	4
2.1 Penelitian Terdahulu	26
3.1 Data Informan	31
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka pemikiran	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Pedoman Wawancara	69
Dokumentasi	71
Biodata.....	76

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional secara luas Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus tetap di pertanggung jawabkan dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang di rasakan sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama (Bambang dan FPPD, 2015:37).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab (akuntabilitas) masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pelayanan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD) (Simanjuntak, 2012:43).

Pendanaan Desa tersebut membutuhkan pertanggung jawaban yang di rekap dalam sebuah dokumen. Pertanggungjawaban tersebut terpapar dalam akuntabilitas administrasi keuangan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan serta aktifitas yang dilakukan instansi pemerintah yang transparan kepada masyarakat dan pengguna yang berorientasi pada kepentingan publik demi kualitas yang lebih baik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2014:15).

Adapun alokasi dana untuk desa di Kecamatan Tangan-tangan tahun 2018-2019 yaitu sebagai berikut pada tabel:

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tangan-Tangan

No	Desa	ADD	
		2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)
1	Adan	1.059.829.000	1.185.620.000
2	Pante Geulumpang	472.964.000	431.248.000
3	Mesjid	249.762.000	250.927.000
4	Gunong Cut	323.854.000	259.783.000
5	Padang Kawa	268.457.000	272.989.000
6	Blang Padang	359.934.000	386.893.000
7	Padang Bak Jeumpa	280.925.000	214.135.000
8	Suak Labu	318.284.000	440.303.000
9	Bineh Krueng	266.076.000	286.060.000
10	Drien Kipah	321.487.000	351.751.000
11	Drien Jalo	242.200.000	179.491.000
12	Padang Bak Jok	364.088.000	405.385.000
13	Suak Nibong	315.428.000	332.033.000
14	Kuta Bak Drien	420.114.000	275.409.000
15	Ie Lhob	345.960.000	229.539.000
	Jumlah	5.609.362.000	5.079.432.500

Sumber: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa terjadi penurunan jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Tangan-tangan. Terjadinya penurunan dana desa di akibatkan oleh menurunnya pemasukan pendapatan daerah yang diakibatkan oleh penurunan pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh pelambatan ekonomi daerah.

Salah satu alokasi dana Desa yang digunakan di Kecamatan Tangan-tangan adalah untuk sektor pertanian seperti pembagian bantuan pupuk bagi petani. Sebanyak 300 kepala keluarga petani di Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), menerima pupuk bantuan sumber dana desa untuk dipergunakan pada musim tanam padi gadu 2019. Pupuk bantuan yang disalurkan ke seluruh warganya merupakan pupuk jenis NPK Phonska Plus (non subsidi) yang dibeli dengan menggunakan dana desa tahap II tahun 2019. Setiap petani

diberikan pupuk NPK Phonska sebanyak 32 kilogram (Dinas Pertanian Aceh Barat Daya, 2020).

Tabel 1.2
Data Alokasi Dana Desa Bagian Pertanian di Desa Ie Lhob Tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa	Dana Untuk Bidang Pertanian	Uraian
2018	Rp. 345.960.000,-	Rp. 301.997.000	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pupuk dan Obat-obata Pertanian Rp. 110.000.000,- • Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan Rp. 191.997.000,-
2019	Rp. 229.539.000,-	Rp. 241.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pupuk dan Obat-obata Pertanian Rp. 110.000.000 • Belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan Rp. 131.000.000,-

Sumber: (Keuchik Desa Ie Lhob, 2021)

Desa Ie Lhob merupakan desa yang mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Desa Ie Lhob merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Jumlah masyarakat Ie Lhob adalah 1.181 jiwa. Dengan jumlah petani sebanyak 12 kelompok petani dengan luas lahan pertanian padi sawah seluas 317 hektar. Jumlah petani yang mendapatkan bantuan pupuk dari alokasi dana desa adalah sebanyak 300 KK petani (Sekdes Desa Ie Lhob Bapak Surya Mawardi, SP, 2021).

Fenomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik perairan, pertanian, peternakan, di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dari banyaknya desa di Kecamatan Tangan-tangan hanya Desa Ie Lhob saja yang memprioritaskan ADD kebagian pertanian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurangnya akuntabilitas pengalokasian dana desa yang ada khususnya untuk pertanian di Desa Ie Lhob. Sebagaimana dalam menyusun

kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, kenyataannya tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian dana desa khususnya bagian pertanian yang di sampaikan kepada masyarakat petani, sehingga akuntabilitas administrasi keuangan yang disalurkan pada bagian pertanian tidak di ketahui besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat petani yang hanya tahu menerima informasi saja tentang jumlah bantuan dana desa yang mereka dapatkan dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya (Hasil wawancara dengan petani di Desa I e Lhob, 2021).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Paulus Isruwan (2011) yang meneliti tentang Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaannya terletak pada tempat dan periode penelitian, dimana penelitiannya terletak pada alokasi dana desa di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian 2008-2010. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dan periode penelitian 2 tahun yaitu 2018-2019. Penelitian ini termotivasi karena observasi awal dengan cara melihat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu Kabupaten penghasil padi terbesar di Provinsi Aceh dengan cara melihat program alokasi dana desa di Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat.

Melihat uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas manfaat yang akan diperoleh dengan diadakannya penelitian ini dijelaskan dalam manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis Ilmiah

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan yang selama ini diperoleh dalam materi perkuliahan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk penelitian
- b. Bagi penelitian lainnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut permasalahan yang penulis bahas.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepustakaa sebagai Karya Tulis yang bisa dijadikan bahan studi untuk dapat dikembangkan bagi pihak yang membutuhkan.

- b. Bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan dan pertimbangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melihat Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa terlambat menyerahkpada Bagian Pertanian.
- c. Bagi Pemerintah Kecamatan Sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya yang menyangkut laporan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Dalam tugasnya mengaudit laporan keuangan, auditor dituntut bekerja dengan akuntabilitas yang tinggi dan secara profesional. Hal ini untuk memenuhi permintaan klien yang menginginkan kinerja yang tinggi. Menurut Dwi Martani, laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan (Martani, 2014:54).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2017:3).

Dalam bidang ilmu akuntansi, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

Menurut Ulum dan Sofyana (2016:40), akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Akuntabilitas (*accountability*) secara harafiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.” Menurut Sujarweni (2015:28), mendefinisikan akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Mahsun , ulidtiyoti dan Purwanugraha (2016:169), akuntabilitas adalah sebagai berikut : “Dalam pengertian yang sempit akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban , menyajikan , melaporkan , dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. ”

2.1.1.1 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam menurut Mahmudi (2015:9) yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri

kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*).

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasanbawahan.

2.1.1.2 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013:9), adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau costumernya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.1.3 Indikator Akuntabilitas

Mahmudi (2011:19) Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan dan disebutkan di atas, maka dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.
3. Akuntabilitas Program
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optima.
 - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
 - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
 - b. Mempertimbangkan dampak dimasa depan.

2.1.2 Adminsitasi

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Admintrasi dalam kehidupan sehari-sehari ataupun dalam dunia kerja ,anda pasti sudah tidak asing dengan istilah admintrasi .Kata ini sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-sehari . Namun tidak semua mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan admintrasi itu sendiri. Menurut Siagian

(2014:13) admintrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dewi (2013:3) dalam buku pengantar admintrasi mengatakan bahwa:

- a. Admintrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai perkerjaan tulis menulis atau ketataushaan atau kesekretarisan
- b. Administrasi meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah mengadakan, mengirim, menyimpan.

Menurut Gie (2014:9) dalam bukunya administrasi perkantiran modern mengatakan bahwa:

- a. Administrasi memiliki pengertian dalam arti luas, yaitu Admintrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya
- b. Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya pemedahan manusia.

2.1.2.2 Fungsi Administrasi

Berdasarkan pengertian administrasi menurut para ahli pengertian tersebut dapat disimpulkan jika perkerjaan ini memiliki fungsi atau peran yang sangat penting. Berikut ini adalah beberapa fungsi administrasi yang harus anda ketahui (Siagian, 2014:17):

1. Planing

Berdasarkan salah satu pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli menyebutkan jika administrasi adalah sebuah kegiatan perencanaan. Maka, fungsi administrasi yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan dimana dalam perencanaan ini dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data kemudian menyusun perencanaan.

2. Organizing

Fungsi selanjutnya yang juga menjadi pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini adalah menyusun serta membentuk hubungan kerja antara satu pihak dengan pihak lain hingga terwujud kesatuan.

3. Reporting

Fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan-keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi ini, pihak yang menerima laporan kegiatan bisa mengetahui dan mendapatkan gambaran informasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dikerjakan.

4. Budgeting

Fungsi terakhir ini sebenarnya bisa masuk dalam ramah administrasi namun dalam bidang keuangan. Dimana jika dilihat berdasarkan fungsi administrasi keuangan ini adalah untuk mengelola atau mengatur segala perencanaan tentang anggaran atau keuangan yang digunakan. Pada dasarnya, pengetahuan administrasi keuangan ini hamper sama dengan

administrasi perkantoran, namun lebih spesifik dalam fungsi mengatur keuangan.

2.1.2.3 Tujuan Administrasi

Tujuan administrasi terbagi menjadi dua yaitu (Siagian, 2014:19):

1. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang lebih kepada organisasi itu sendiri, artinya dengan adanya pola administrasi, ditujukan untuk mencapai target sebuah organisasi pada dasarnya tujuan jangka panjang tidak dibuat oleh sembarang orang dalam organisasi melainkan oleh para pemilik organisasi tersebut, yang bersifat: Ideal, Administrasi bersifat general, Kualifikasi tidak terbatas.

2. Tujuan jangka pendek

Tujuan administrasi jangka pendek organisasi bersifat lebih kecil, biasanya dibuat oleh sub –sub divisi dari organisasi untuk kebijakan divisinya. Tujuan jangka pendek bersifat spesifik, ruang lingkup kecil dan kualifikasinya terbatas.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Administrasi

Gie (2014:9) Ruang lingkup administrasi yaitu bahwa ini terdiri dari informasi atau keterangan tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan atau pengamatan seperti:

- a. Menghimpun Adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan secara detail kemudian di simpan untuk tujuan agar nanti bisa digunakan bila diperlukan.

- b. Mencatat atau Menuliskan atau Mengetik Adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca atau dikirim.
- c. Mengelola Adalah mengelola atau menganalisis suatu bentuk data administrasi yang telah ada atau yang sudah ada , guna mendapatkan hasil dari data yang dihimpun.
- d. Menyimpan Adalah kegiatan mengamankan dokumen atau mendokumentasikan data dengan berbagai cara untuk nantinya di gunakan kembali jika di perlukan.
- e. Mengirim Adalah kegiatan sebagai data atau file ke pihak lain lebih baik dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi.

2.1.3 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2014:1): Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah: Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” Menurut Fahmi (2015:21), pengertian laporan keuangan adalah: Suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

2.1.3.2 Tujuan Pembuatan atau Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan utama pembuatan dan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014:3), tujuan laporan keuangan adalah: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Fahmi (2014:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah: Memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir (2016:11), tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
- b. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang

akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.

- c. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.3.3 Keterbatasan Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan tertentu. Menurut Kasmir (2016:16) mengemukakan bahwa ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan alokasi dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Saibani, 2014:4).

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Sri, 2017:14).

2.1.4.1 Tujuan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan alokasi dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan alokasi dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (Sri, 2017:14):

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya (Sri, 2017:14):

- 2) Alokasi dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- 3) Rata-rata alokasi dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk

kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

- 4) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

2.1.4.2 Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa

Penggunaan alokasi dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya (Sri, 2017:22):

- a. Penggunaan alokasi dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
 - 1) Sarana prasarana desa, meliputi:
 - a) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - c) Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa.

- 2) Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
 - a) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.
 - b) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.
 - 3) Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:
 - a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
 - b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya bersekala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain: lumbung desa, cold storage, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.
 - 4) Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - a) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.
 - b) Penanganan bencana alam.
 - c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d) Pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Sarana prasarana lainnya.
- b. Penggunaan alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
 - 3) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
 - 4) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.

- 5) Pengembangan system informasi desa.
- 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- 7) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- 8) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- 9) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 10) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- 11) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- 12) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.1.5 Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri (Julius, 2015:308)

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah

sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Putong, 2015:93).

Peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor. pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya (Tulus, 2016:23).

Menurut Van Aarsten dalam Tulus (2016:23) pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang mendukung penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu telah dilakukan oleh mereka sebagai acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian lainnya kedepan. Penelitian terdahulu daam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Alat Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Paulus (2011)	Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif kualitatif	analiss data dalam penelitian ini adalah kualitatif	Sistem dan mekanisme akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparatus pemerintah desa.
2	Dwi (2014)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember	Deskriptif kualitatif	analiss data dalam penelitian ini adalah kualitatif	Pertanggungja waban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungja waban sudah cukup baik.
3	Ade (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di kecamatan Dolo selatan Kabupaten Sigi	Deskriptif kualitatif	analiss data dalam penelitian ini adalah kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

Tabel 2.1/ Lanjutan

					<p>pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggung jawaban masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah</p>
4	Made (2017)	<p>Analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan Alokasi dana desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>analiss data dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ,</p>
5	Vilmia (2018)	<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>analiss data dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>Hasil analisis data menunjukkan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerapkan asas-asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. hal</p>

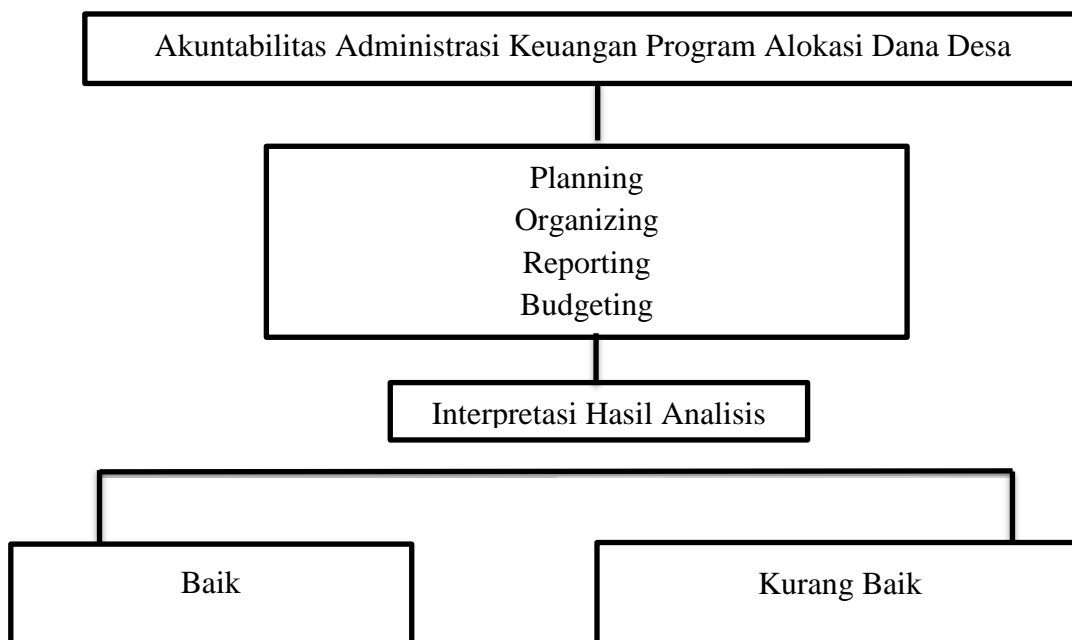
Tabel 2.1/ Lanjutan

					tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data diolah, 2021.

2.2 Kerangka Pemikiran

Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dalam memutuskan sesuatu membutuhkan perencanaan, pembagian tugas, pelaporan, pengelolaan anggaran sehingga semua berjalan dengan baik. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut diberi penjelasan sebagai berikut. Keterbukaan atau akuntabilitas alokasi dana desa program pertanian sangat diperlukan terutama pada bagian keuangan aloaksi dana desa hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban aparat desa yang tarnasparan dalam hal keuangan. Alokasi dana desa juga di gunakan dalam bidang pertanian sehingga masyarakat memiliki hal untuk mengetahui akuntabilitas alokasi dana desa program yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kasus, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan Analisis Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa bagian pertanian) pada Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang diambil dari penelitian ini melalui wawancara dengan pihak kecamatan tentang Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa.

3.2 Informan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2014:200) informan penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek/informan penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan..

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Data informan penelitian

No	Data Informan	Jumlah
1	Camat Kecamatan Tangan-tangan	1
2	Kepala Desa di Kecamatan Tangan-tangan	1
3	Kelompok Petani mewakili Desa Ie Lhob	5
Total Jumlah		7

Adapun tujuan diambilnya beberapa informan di atas, hal ini dikarenakan mereka tersebut dianggap dapat memberikan informasi yang jelas serta dapat memberikan data-data yang tepat dalam menunjang penelitian penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Indriantoro & Supomo (2014:27). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendatangi secara langsung di Desa Ie Lhob dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Dalam pengumpulan data, peneliti menunggu responden menjawab semua kuesioner yang telah disediakan sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan wawancara dengan informan tersebut, peneliti memperkirakan waktu selama 2 minggu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2012:186). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Pedoman wawancara bersumber dari Siagian (2014:17)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang terpilih.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2013, h. 118). Dokumen dalam penelitian dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

3.5 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, sebagaimana yang diketahui dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution (2013:5) penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka

tentang dunia sekitar, kemudian Nana Syaodih Sukmadinata (2015:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Meskipun dalam penelitian kualitatif peneliti itu sebagai instrumen kunci, namun untuk membantu kelancaran dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrumen bantu sebagai panduan kuesioner/angket, wawancara dan observasi lapangan, seperti dokumen, kamera, alat rekam dan lain sebagainya.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi	Skala	Perolehan Data	Referensi
1	Akuntabilitas Administrasi Keuangan	Akuntabilitas Administrasi Keuangan adalah kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Wawancara	Dinas Pertanian Aceh Barat Daya	Hery (2017:3)
2	Alokasi Dana Desa	Alokasi Dana Desa adalah jumlah pemasukan dan rincian pengeluaran dana desa yang di berikan kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Aceh Barat Daya.	Wawancara	Dinas Pertanian Aceh Barat Daya	(Sri, 2017:14)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti teknik umum yang dipakai dalam penelitian kualitatif, yakni analisis sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus ini hanya bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan lebih lanjut.

Analisis data selama di lapangan dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2014:67), Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)”.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang banyak diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis melalui reduksi data. “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi” (Sugiyono, 2014:67).

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif” (dalam Sugiyono, 2014:68).

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan pernyataan yang singkat dan mudah dipahami yang disajikan ulang dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. Sugiyono (2014:68) menyebutkan, “kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika sebaliknya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

3.8 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check* (Sugiyono, 2014:69).

Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan semua tahapan pengujian seperti yang telah disebutkan di atas, melainkan menggunakan beberapa teknik pengujian data yang peneliti anggap cukup memadai yaitu:

a. Meningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi baik dari buku, dokumen-dokumen ataupun media

massa seperti koran, televisi dan lainnya. Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data.

b. Triangulasi

Dikutip dalam Sugiyono (2014:69) “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 4 antara lain:

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini Dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk di pergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi dalam penelitian ini adalah dengan adanya pendukung untuk pembuktian data yang didapat oleh peneliti. Seperti halnya untuk membuktikan mengenai gambaran suatu keadaan , maka dibutuhkan

gambar ataupun foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera handycam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Ie Lhob termasuk dalam wilayah kemukiman Tangan-Tangan Rayeuk Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas wilayah \pm 800 Ha. Jumlah penduduk gampong Ie Lhob Kecamatan Tangan-Tangan berjumlah 1.181 Jiwa yang terdiri dari penduduk Laki-Laki berjumlah 554 Jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 627 Jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 344 Kepala Keluarga (KK). Gampong Ie Lhob termasuk dalam wilayah Kemukiman Tangan-Tangan Rayeuk Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Secara Administrasi dan geografis serta didukung oleh bukti-bukti dari keterangan Tokoh-Tokoh Masyarakat Gampong Ie Lhob berbatasan dengan :

Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Tangan-Tangan Cut, Kec.Setia

Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Kuta Bak Drien

Sebelah Utara berbatasan dengan Pengunungan Bukit Barisan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Moun Mameh, Kec. Setia

4.2 Hasil Penelitian

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam

melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa.

4.1.1 Planning

Planning atau perencanaan adalah merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hani Handoko (2012) menjelaskan bahwa:“ Perencanaan (*planning*) ialah pemilihan atau penetapan suatu tujuan organisasi dan menentukan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.

Planning atau perencanaan yang terdapat dalam akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa adalah menyangkut tentang jumlah alokasi dana desa, perencanaan penggunaan dana tersebut, perencanaan pengembangan pertanian dari dana tersebut dan lainnya, dalam hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Staf Kecamatan Tangan-tangan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yaitu Bapak Jasmadi, S.Pd selaku Camat di Kecamatan Tangan-tangan, dimana hasil wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Berapa jumlah alokasi dana desa yang diterima desa ini di tahun 2020 dan 2021

Jawab : *Penyaluran alokasi dana desa dari Kecamatan tidak ada, karena dana desa tersebut langsung masuk ke rekening desa dari pusat, tidak melalui Kecamatan lagi. Tetapi kalau laporan desa yang diberikan ke kecamatan ada.*

Pertanyaan 2 : Bagaimana perencanaan alokasi dana desa tersebut di gunkana untuk bagian pertanian?

Jawab : *Tidak tahu. Untuk perencanaan alokasi dana desa tersebut, perencanaan pembangunan pertanian dari alokasi dana desa dan perencanaan bantuan modal bagi petani itu semua sebaiknya di tanyakan langsung kepada pihak desa. Karena kami dari Kecamatan tidak tahu tentang itu..”*

Pertanyaan 3 : Apa saja perencanaan pembangunan pertanian yang akan dilakukan didesa ini dari alokasi dana desa?

Jawab : *Tidak tahu. Untuk perencanaan alokasi dana desa tersebut, perencanaan pembangunan pertanian dari alokasi dana desa dan perencanaan bantuan modal bagi petani itu semua sebaiknya di tanyakan langsung kepada pihak desa. Karena kami dari Kecamatan tidak tahu tentang itu..”*

Pertanyaan 4 : Apakah ada perencanaan bantuan modal bagi petani?

Jawab : *Tidak tahu. Untuk perencanaan alokasi dana desa tersebut, perencanaan pembangunan pertanian dari alokasi dana desa dan perencanaan bantuan modal bagi petani itu semua sebaiknya di tanyakan langsung kepada pihak desa. Karena kami dari Kecamatan tidak tahu tentang itu..”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kecamatan Tangan-tangan secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya penyerahan alokasi dana desa yang dilakukan dari Kecamatan, tetapi langsung masuk ke rekening desa, sehingga pihak kecamatan tidak mengetahui tentang perencanaan dana tersebut.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan yaitu Bapak Ubat, D selaku Kepala Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Berapa jumlah alokasi dana desa yang diterima desa ini di tahun 2020 dan 2021

Jawab : *Jumlah alokasi dana desa di Desa Ie Lhob tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 229.539.000,-. Jumlah ini menurun dari tahun 2018 yang lebih besar jumlahnya yaitu sebesar Rp. Rp. 345.960.000,- .. Untuk jumlah Dana desa di tahun 2019 sebesar Rp. 731.365.000,- jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dnegan*

jumlah tahun 2018 sebesar Rp. 705.142.000,-. Pada tahun 2019 perencanaan alokasi dana desa tersebut yang digunakan untuk bagian pertanian adalah sebesar Rp. 241.000.000.

Pertanyaan 2 : Bagaimana perencanaan alokasi dana desa tersebut di gunkana untuk bagian pertanian?

Jawab : *dimana dana tersebut masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk belanja pupuk/obat-obatan pertanian sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk pengadaan bibit/induk ternak sebesar Rp. 131.000.000,-. Untuk tahun 2018 alokasi dana desa tersebut yang digunakan untuk bagian pertanian adalah sebesar Rp. 301.997.000. dimana dana tersebut masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk belanja pupuk/obat-obatan pertanian sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk pengadaan bibit/induk ternak sebesar Rp. 191.997.000,-.*

Pertanyaan 3 : Apa saja perencanaan pembangunan pertanian yang akan dilakukan didesa ini dari alokasi dana desa?

Jawab : *Untuk pembangunan pertanian yang akan dilakukan belum ada, karena dana untuk pertanian itu akan dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan aparat desa dan masyarakat, jika ada usulan pembangunan pertanian baru di susun anggarannya dan akan di alokasikan, tetapi jika tidak ada usulan maka tidak ada dana untuk pembangunan pertanian dari dana tersebut.*

Pertanyaan 4 : Apakah ada perencanaan bantuan modal bagi petani?

Jawab : *Perencanaan bantuan modal bagi petani juga begitu, tidak ada dikhususkan bagi petani yang ada itu adalah bantuan pinjam modal dari BUMG jadi siapa saja boleh baik petani maupun masyarakat biasa*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yaitu kepala desa Ie Lhob secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa jumlah alokasi dana desa di tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah alokasi dana desa di tahun 2018. Selain itu perencanaan pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena anggaran dana bagi petani dari alokasi dana desa akan dikeluarkan sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan

masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun angrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu Bapak Zainal dan Bapak Rustam selaku 2 orang kelompok tani di Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Berapa jumlah alokasi dana desa yang diterima desa ini di tahun 2020 dan 2021

Jawab : *kalau jumlah alokasi dana desa itu berapa kami tidak tahu jumlahnya, itu ditanyakan saja kepada keuchik atau aparat desa disini*

Pertanyaan 2 : Bagaimana perencanaan alokasi dana desa tersebut di gunkana untuk bagian pertanian?

Jawab : *Termasuk perencanaan alokasi dana desa tersebut untuk pertanian, yang kami tahu hanya ada pembagian pupuk dan bibit untuk kami petani, kalau yang lainnya kami tidak tahu.*

Pertanyaan 3 : Apa saja perencanaan pembangunan pertanian yang akan dilakukan didesa ini dari alokasi dana desa?

Jawab : *terlebih pembangunan pertanian kami juga tidak tahu perencanaanya, karena sampai saat ini tidak ada pembangunan pertanian di desa ini, tidak ada pembangunan seperti irigasi, peraran dan lainnya*

Pertanyaan 4 : Apakah ada perencanaan bantuan modal bagi petani?

Jawab : *Kalau masalah bantuan modal usaha itu tidak ada khusus untuk kami petani, tetapi merata bagi siapa saja yang memiliki usaha baik pertanian maupun bukan pertanian, itupun pinjamnya melalui BUMG dengan bayaran cicilan setiap bulannya*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa keseluruhan dan perencanaan untuk pertanian.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu 3 Bapak Bustami, Bapak Muksin dan Bapak Rusmali selaku kelompok tani di Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Berapa jumlah alokasi dana desa yang diterima desa ini di tahun 2020 dan 2021

Jawab : *jumlah alokasi dana desa itu setahu kami di tahun 2019 sekitar 229 juta sekian , pstinya tidak tahu, tanya saja ke keuchik atau bendahara desa. Sebenanrnya ada di tempelkan di mesjid jumlah dana desa, dikantor keuchik pun ada. Hanya saja kami tidak terlalu memperhatikannya. Apalagi itu tahun 2019 kan sudah lama, jadi tidak ingat lagi.*

Pertanyaan 2 : Bagaimana perencanaan alokasi dana desa tersebut di gunkana untuk bagian pertanian?

Jawab : *Kalau di tanya perencanaan alokasi dana desa di tahun 2019 untuk pertanian setahu kami yang ada adalah pembagian pupuk dan bibit, hanya itu saja, kalau pupuk itu semua masyarakat di desa ini dapat sebanyak 20 Kg per KK, itu jika ada keluarga yang bukan petani maka mereka menjual pupuk tersebut kepada kami para petani*

Pertanyaan 3 : Apa saja perencanaan pembangunan pertanian yang akan dilakukan didesa ini dari alokasi dana desa?

Jawab : *Kalau yang lainnya tidak ada. Kalau pembangunan pertanian dari tahun 2019 sampai saat ini tidak ada ya. Karena masih sepert ini saja pertanian kami. Apalagi bantuan modal khusus bagi petani, tidak da.*

Pertanyaan 4 : Apakah ada perencanaan bantuan modal bagi petani?

Jawab : *Kami kalau butuh modal itu ajukan pinjaman sama BUMG, itu bukan hanya petani, tetapi siapa saja boleh yang penting ada usaha. Setahu kami dana untuk pertanian itu akan di keluarkan jika ada usulan saat rapat desa dilakukan. Akan tetapi untuk tahun 2020 dan 2021 ini tidak ada karena dana desakan sebagian dialihkan untuk penanganan covid setahu kami. Jadi mana cukup lagi untuk yang lainnya.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa mereka tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa keseluruhan dan perencanaan untuk pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada planning alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa jumlah alokasi dana desa di tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah alokasi dana desa di tahun 2018. Selain itu perencanaan pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena anggaran dana bagi petani dari alokasi dana desa akan dikeluarkan sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Sedangkan para petani, mereka tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa keseluruhan dan perencanaan untuk pertanian. Semua masyarakat di desa Ie Lhob mendapatkan pupuk sebanyak 20 Kg per KK, jika ada keluarga yang bukan petani maka mereka akan menjual pupuk tersebut kepada para petani.

4.1.2 Organizing

Pengorganisasian atau Organizing adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokkan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Menurut Schermerhorn (2012), Pengorganisasian adalah proses mengatur orang-orang dan sumber daya lainnya untuk bekerja ke arah tujuan bersama. Dalam pengorganisasian, penyusunan struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas atau pekerjaan, tanggung jawab, hak dan wewenang mereka.

Organizing atau organisasi yang terdapat dalam akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa adalah menyangkut tentang penyusunan kerja, kerjasama antara berbagai pihak, dalam hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Bapak Jasmadi, S.Pd selaku camat Kecamatan Tangan-tangan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa ini?

Jawab : *kalau maslaah penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa pastinya ada ya di setiap desa, tidak terkecuali desa Ie Lhob*

Pertanyaan 2 : Bagaimana cara penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa khususnya pada bagian pertanian?

Jawab : *Akan tetapi apasaja penyusunan kerja dan bagaimana cara penyusunan kerja tersebut khususnya pada bidang pertanian kami di Kecamatan tidak tahu ya, dikarenakan itu semuanya sudah sepenuhnya wewenang pihak desa, jadi lebih jelasnya tanyakan saja langsung ke keuchik atau aparat desa Ie Lhob.*

Pertanyaan 3 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dengan aparat desa masing-masing dalam pengelolaan alokasi dana desa bagian pertanian?

Jawab : *Kalau kerjasama aparat kecamatan dengan aparat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di bidang pertanian itu tidak terlalu banyak ya, paling pihak kecamatan ada melakukan penyuluhan ke desa-desa untuk memajukan pertanian di desa.*

Pertanyaan 4 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara aparat desa dengan petani dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Jawab : *Hanya itu saja kalau yang lainnya itu urusan desa ya. Klau kerjasama aparat desa dengan petani itu kami juga tidak tahu. Tanyakan saja langsung ke desanya ya*

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kecamatan Tangan-tangan secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak

mengetahui tentang penyusunan kerja dan kerjasama aparat desa dengan petani mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Ie Lhob.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan yaitu Bapak Ubat , D selaku Kepala Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa ini?

Jawab : *pastinya ada penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa ya, seperti adanya rapat antara aparat desa dan masyarakat semua lapisan masyarakat ya, disitu kita buat dan kita susun anggaran alokasi dana desa ini akan dikemana saja, jumlahnya berapa, cukup atau tidak. Selanjutnya baru akan kita realisasikan dilapangan. Kalau penyusunan kerja pembagian alokasi dana desa untuk bidang pertanian itu seperti ditahun 2018 dan 2019 itu saat rapat para petani mengusulkan adanya pembagian pupuk, dan bibit untuk mereka supaya mereka dapat melakukan pertanian dengan baik.*

Pertanyaan 2 : Bagaimana cara penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa khususnya pada bagian pertanian?

Jawab : *Nah itu kita lihat jumlahnya berapa dapat kita adakan, baru kita adakan, maka terealisasi jumlah dana desa untuk itu di tahun 2018 dan 2019. Akan tetapi di tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi, karena jumlah dananya tidak cukup, kan sudah digunakan sebagian untuk penanganan covid-19 selama masa pandemi.*

Pertanyaan 3 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dengan aparat desa masing-masing dalam pengelolaan alokasi dana desa bagian pertanian?

Jawab : *Kalau untuk kerjasama antara aparat kecamatan dan aparat desa Ie lhob itu adalah pada bagian penyuluhan pertanian saja, kami mengusulkan ke Kecamatan untuk diadakan penyuluhan pertanian di desa ini, maka pihak kecamatan menyambut dengan tangan terbuka dan mengadakannya.*

Pertanyaan 4 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara aparat desa dengan petani dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Jawab : *Kalau untuk kerjasama antara aparat desa dan petani dalam pengelolaan dana desa ini ya seperti ya ng saya bilang tadi saat*

ada rapat disitu baru diusulkan dan kita realisasikan jika dananya mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yaitu kepala desa Ie Lhob secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa ada penyusunan kerja dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk bidang pertanian. Akan tetapi itu di tahun 2018 dan 2019 sedangkan di tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi karena dananya kurang sudah digunakan untuk penanganan covid-19.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu Bapak Zainal dan Rustam selaku 2 kelompok tani di Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada penyusunan kerja untuk pebagian alokasi dana desa ini?

Jawab : *kalau penyusunan kerja itu setahu kami ada, tapi rinciannya kami tidka tahu. Itu di susun saat rapat ditahun 2018 dan 2019. Kalau sekarang tidak ada lagi.*

Pertanyaan 2 : Bagaimana cara penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa khususnya pada bagian pertanian?

Jawab : *Cara penyusunannya itu saat rapat kami para petani mengusulkan bantuan untuk pertanian dari dana aloaksi desa, untuk pupuk dan bibit, nah aparat desa mencatat dan menyusun jumlah pupuk dan bibit yang dibutuhkan dan jumlh anggarannya kemudian baru di realisasikan.*

Pertanyaan 3 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dengan aparat desa masing-masing dalam pengelolaan alokasi dana desa bagian pertanian?

Jawab : *Kalau kerjasama dengan kecamatan kami tidak tahu ya,*

Pertanyaan 4 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara aparat desa dengan petani dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Jawab : *kalau kerjasama aparat desa dengan kami para petani itu paling di tahun 2018 dan 2019 itu ya di rapat desa itu, di realisasikan pembagian pupuk dan bibit. Yang lainnya tidak ada*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa ada penyusunan kerja hanya saja para petani tidak tahu rincian penyusunan kerja tersebut. Kalau kerjasama yang ada dilakukan hanya di tahun 2018 dan 2019.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu 3 yaitu Bapak Bustami, Bapak Muksin dan Bapak Rusmali selaku kelompok tani di Desa Le Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa ini?

Jawab : *penyusunan kerja pastinya ada ya dilakukan di setiap desa. Penyusunan kemana saja alokasi dana desa itu akan di peruntukkan, jumlahnya dan waktu pengalokasinya. Pastinya diutamakan yang kebutuhan desa yang paling mendesak dan penting ya.*

Pertanyaan 2 : Bagaimana cara penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa khususnya pada bagian pertanian?

Jawab : *Cara penyusunan kerjanya, pasti aparat desa melihat apa saja yang dibutuhkan di desa, dengan mendengarkan masukan dan keluhan dari berbagai pihak di desa yaitu aparat desa, tokoh peub, dan masyarakat.*

Pertanyaan 3 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dengan aparat desa masing-masing dalam pengelolaan alokasi dana desa bagian pertanian?

Jawab : *Kalau kerjasama pihak kecamatan dengan desa itu ada seperti penyuluhan pertanian, kalau lainnya kami tidak tahu.*

Pertanyaan 4 : Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara aparat desa dengan petani dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Jawab : *Kalau kerjasama aparat desa dengan petani itu ada juga ya, seperti merelasikan bantuan pupuk dan bibit untuk kami petani di tahun 2018 dan 2019, selain itu membantu kami membuat proposal untuk mengajukan bantuan pertanian pada kantor pertanian sekarang. Karena kan di tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi alokasi dana desa untuk pertanian disebabkan dialihkan ke penanganan covid*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa ada penyusunan kerja hanya saja para petani tidak tahu rincian penyusunan kerja tersebut. Kalau kerjasama yang ada dilakukan hanya di tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada organizing alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak mengetahui tentang penyusunan kerja dan kerjasama aparat desa dengan petani mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Ie Lhob. Kalau dari Desa ada penyusunan kerja dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk bidang pertanian. Akan tetapi itu di tahun 2018 dan 2019 sedangkan di tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi karena dananya kurang sudah digunakan untuk penanganan covid-19. Kelompok tani yakin ada penyusunan kerja hanya saja para petani tidak tahu rincian penyusunan kerja tersebut. Kalau kerjasama yang ada dilakukan hanya di tahun 2018 dan 2019.

4.1.3 Reporting

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. (Siagina, 2013). Penyampaian laporan tersebut baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang member laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan

hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Reporting atau pelaporan yang terdapat dalam akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa adalah menyangkut tentang kegiatan pelaporan, rekap laporan, kelengkapan laporan, dalam hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan Bapak Jasmadi, S.Pd selaku camat Kecamatan Tangan-tangan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada dilakukan kegiatan pelaporan oleh petani yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa kepada aparat desa?

Jawab : *kalau pelaporan dari petani ke desa itu kami pihak kecamatan tidak tahu, langsung saja tanyakan ke ppihak desa.*

Pertanyaan 2 : Laporan yang di lakukan petani tentang alokasi dana desa yang digunakan dalam bentuk apa?

Jawab : *Bentuk laporannya pun tanyakan saja sama aparat desa langsung.*

Pertanyaan 3 : Apakah laporan dari petani tersebut akan di rekap dan dilaporkan kembali pada aparat kecamatan oleh aparat desa?

Jawab : *Kalau laporan yang dilaporkan ke pada ppihak kecamatan itu hanya dari desa ya, bukan dari petani.*

Pertanyaan 4 : Apa saja laporan yang di berikan oleh aparat desa kepada aparat kecamatan tentang alokasi dana desa untuk pertanian didesa ini?

Jawab : *Kalau laporan yang pihak desa berikan kepada kami itu berupa jumlah alokasi dana desa, rincian pengeluarannya, itu semua dalam bentuk buku.*

Pertanyaan 5 : Apakah aparat kecamatan ada membuat laporan dana dilaporkan ke pemerintah Kabupaten?

Jawab : *Selanjutnya baru kami rekap dari semua desa yang ada di Kecamatan Tangan-tangan ini kami jadikan satu dan kami laporkan kepihak Kabupaten Aceh Barat Daya.*

Pertanyaan 6 : Sejauh ini apakah laporan alokasi dana desa dari setiap desa yang ada di Kecamatan ini sudah lengkap?

Jawab : *Sejauh ini sudah lumayan lengkap, akan tetapi belum semua desa menyerahkan laporan tersebut.*

Pertanyaan 7 : Apakah ada desa yang sering terlambat memberikan laporan alokasi dana desanya?

Jawab : *Kalau desa yang sering terlambat itu ada ya, ada beberapa*

Pertanyaan 8 : Desa mana saja yang terlambat dalam memberikan laporan tersebut?

Jawab : *Desa yang terlambat itu seperti desa Nibong, Labu dan Kawa*

Pertanyaan 9 : Apa kendalanya?

Jawab : *Kendalanya mereka katakan karena laporan dana tersebut harus di cek satu persatu dan kebanyakan petani atau masyarakat yang mendapatkan dana desatidak memberikan laporan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kecamatan Tangan-tangan secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa laporan alokasi dana desa dari pihak desa ke Kecamatan ada di berikan, akan tetapi belum semua desa menyerahkannya, terdapat beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan tersebut karena kendala waktu dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana tersebut belum memberikan laporan.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan yaitu Bapak Ubat D selaku Kepala Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada dilakukan kegiatan pelaporan oleh petani yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa kepada aparat desa?

Jawab : *kalau kegiatan pelaporan dari petani ke pihak desa itu tidak ada ya, bentuknya juga tidak ada, karena tidak ada laporannya*

Pertanyaan 2 : Laporan yang di lakukan petani tentang alokasi dana desa yang digunakan dalam bentuk apa?

Jawab : *Kalau laporan tersebut ada pasti kami rekap, tapi ini tidak ada.*

Pertanyaan 3 : Apakah laporan dari petani tersebut akan di rekap dan dilaporkan kembali pada aparat kecamatan oleh aparat desa?

Jawab : *Kalau laporan dari pihak desa ke pihak Kecamatan itu ada ya,*

Pertanyaan 4 : Apa saja laporan yang di berikan oleh aparat desa kepada aparat kecamatan tentang alokasi dana desa untuk pertanian didesa ini?

Jawab : *kami laporkan tentang jumlah keseluruhan dana desa dan alokasi dana desa, kemudian kemana saja rincian dana tersebut kami keluarkan secara rinci. Laporan tersebut kami buat dalam satu buku laporan desa.*

Pertanyaan 5 : Apakah aparat kecamatan ada membuat laporan dana dilaporkan ke pementah Kabupaten?

Jawab : *Kalau dari pihak Kecamatan ke pihak Kabupaten saya rasa juga pasti ada ya, dikarenakan sistem pemerintahan itu dari bawah ke atas laporannya jadi pasti bertingkat terus dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke Kabupaten dari kabupaten ke provinsi , dari provinsi ke Ibukota atau pusat*

Pertanyaan 6 : Sejauh ini apakah laporan alokasi dana desa dari setiap desa yang ada di Kecamatan ini sudah lengkap?

Jawab : *Kalau kelengkapan laporan tersebut tanyakan langsung ke pihak kecamatan ya.*

Pertanyaan 7 : Apakah ada desa yang sering terlambat memberikan laporan alokasi dana desanya?

Jawab : *Desa mana saja yang terlambat juga tanyakan ke kecamatan saja*

Pertanyaan 8 : Desa mana saja yang terlambat dalam memberikan laporan tersebut?

Jawab : *Desa mana saja yang terlambat juga tanyakan ke kecamatan saja*

Pertanyaan 9 : Apa kendalanya?

Jawab : *Kalau kendala pelaporan saya rasa mungkin dari segi waktu penyelesaian laporannya yang direkap ya.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yaitu kepala desa Ie Lhob secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa laporan alokasi dana desa

dari pihak desa ke Kecamatan ada di berikan, akan tetapi belum semua desa menyerahkannya, terdapat beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan tersebut karena kendala waktu dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana tersebut belum memberikan laporan.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu Bapak Zainal dan Bapak Rustam selaku kelompok tani di Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Apakah ada dilakukan kegiatan pelaporan oleh petani yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa kepada aparat desa?

Jawab : *kalau laporan dari kami ke pihak desa itu tidak ada. Karena kami kan Cuma menerima pupuk dan bibit saja bukan bantuan modal berupa uang.*

Pertanyaan 2 : Laporan yang di lakukan petani tentang alokasi dana desa yang digunakan dalam bentuk apa?

Jawab : *Jadi tidak ada laporan apapun dalam bentuk apapun*

Pertanyaan 3 : Apakah laporan dari petani tersebut akan di rekap dan dilaporkan kembali pada aparat kecamatan oleh aparat desa?

Jawab : *Tidak ada*

Pertanyaan 4 : Apa saja laporan yang di berikan oleh aparat desa kepada aparat kecamatan tentang alokasi dana desa untuk pertanian didesa ini?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Pertanyaan 5 : Apakah aparat kecamatan ada membuat laporan dana dilaporkan ke pemerintah Kabupaten?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Pertanyaan 6 : Sejauh ini apakah laporan alokasi dana desa dari setiap desa yang ada di Kecamatan ini sudah lengkap?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Pertanyaan 7 : Apakah ada desa yang sering terlambat memberikan laporan alokasi dana desanya?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Pertanyaan 8 : Desa mana saja yang terlambat dalam memberikan laporan tersebut?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Pertanyaan 9 : Apa kendalanya?

Jawab : *Kami tidak atahu soal itu*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada laporan yang diberikan oleh pihak petani kepada desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada reporting alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa laporan alokasi dana desa dari pihak desa ke Kecamatan ada di berikan, akan tetapi belum semua desa menyerahkannya, terdapat beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan tersebut karena kendala waktu dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana tersebut belum memberikan laporan. tidak ada laporan yang diberikan oleh pihak petani kepada desa.

4.1.4 Budgeting

Budgeting adalah penganggaran merupakan metode yang telah di terapkan di berbagai macam jenis bisnis, yang bisa digunakan untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu. Jika saat ini, anda masih mencari tahu apa itu budgeting dan cara penerapannya, maka jawabannya akan ditemukan disini. Sebelum di implementasikan pada bisnis anda, ada baiknya mengenal terlebih dahulu istilah budgeting.

Budegting atau penganggaran yang terdapat dalam akuntabilitas administrasi keuangan program alokasi dana desa adalah menyangkut tentang pengaturan keuangan, kecukupan dana, jumlah bantuan dan lainnya, dalam hal ini

sebagai mana hasil wawancara dengan Staf Kecamatan Tangan-tangan sebagai berikut:

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yaitu Bapak Jasmadi, S.Pd selaku camat kecamatan Tangan-tangan, dimana hasil wawancara sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana cara aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek di desa ini?

Jawab : *kalau cara aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek di desa itu kami pihak kecamatan tidak tahu, jadi langsung saja tanyakan ke pihak desa.*

Pertanyaan 2 : Apakah jumlah alokasi dana desa yang ada tersebut sudah mencukupi untuk membangun desa dalam segala aspek?

Jawab : *Saya rasa jumlah dana desa yang diberikan tersebut pada setiap desa pasti sudah cukup untuk membangun desa.*

Pertanyaan 3 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani didesa ini?

Jawab : *Kalau dana desa dapat meningkatkan pendapatan petani atau tidak kami tidak tahu, karena itu semua urusan pihak desa.*

Pertanyaan 4 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat mengembangkan pertanian di desa ini kearah yang lebih baik lagi?

Jawab : *Begitu juga dengan perkembangan pertanian semua pihak desa yang lebih tahu.*

Pertanyaan 5 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi pembangunan sarana pertanian didesa ini?

Jawab : *Jumlah bantuan dana desa untuk pertanian juga hanya pihak desa yang tahu pastinya.*

Pertanyaan 6 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi modal usaha petani?

Jawab : *Modal usaha petani juga pihak desa yang tahu, kalau kami hanya menerima laporannya saja. Jadi kalau tanya per desa harus buka rekap satu-satu dulu.*

Pertanyaan 7 : Bagaimana cara petani mengembalikan bantuan tersebut?
 Jawab : *Pengembalian bantuan untuk petani itu ada jika itu bantuan pinjaman modal usaha ya, kalau bukan itu maka tidak ada.*

Pertanyaan 8 : Apasaja syarat yang harus petani lengkapi untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa tersebut?
 Jawab : *Syarat untuk mendapatkan bantuan langsung tanyakan ke desa saja*

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Kecamatan Tangan-tangan secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak tahu pasti semua tentang jumlah bantuan pertanian, bantuan modal usaha, dan lainnya. Karena itu semua sudah sepenuhnya urusan pihak desa.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan yaitu Bapak Ubat D selaku Kepala Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana cara aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek di desa ini?

Jawab : *cara kami aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek didesa adalah dengan melakukan musyawarah setiap kali dana desa sudah cair. Jadi kami adakan rapat dengan semua lapisan dari aparat desa, tuha peut, dan masyarakat yang bergerak di berbagai aspek baik petani, pedagang dan lainnya. Kami bicarakan apasaja yang dibutuhkan oleh desa, kemudian kami urutkan mana yang paling penting dan itu yang kami utamakan, kemudian jika dananya ada lebih baru digunakan untuk pertimbangan lain yang tadi kurang penting.*

Pertanyaan 2 : Apakah jumlah alokasi dana desa yang ada tersebut sudah mencukupi untuk membangun desa dalam segala aspek?

Jawab : *Klau ditanya cukup ya cukup. Karenakan kami harus mencukup-cukupi untuk kebutuhan desa, kan tidak ada penambahan juga walaupun tidak cukup.*

Pertanyaan 3 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani didesa ini?

Jawab : *Kalau ditanya dana tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani pasti iya, tapi itu di tahun 2018 dan 2019 ya, karena mereka tidak payah beli pupuk dan bibit lagi. Sehingga modal untuk pupuk dan bibit dapat digunakan untuk yang lainnya.*

Pertanyaan 4 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat mengembangkan pertanian di dsa ini kearah yang lebih baik lagi?

Jawab : *Pengembangan pertanian dari dana desa belum sepenuhnya ya, karenakan tidak rutin setiap tahunnya petani mendapatkan bantuan pertanian itu. Kalau bantuan untuk sarana pembangunan pertanian tidak ada ya, yang ada untuk pupuk dan bibit saja.*

Pertanyaan 5 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi pembangunan sarana pertanian didesa ini?

Jawab : *Kalau bantuan modal usaha juga tidak ada.*

Pertanyaan 6 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi modal usaha petani?

Jawab : *Hanya jumlah bantuan pada tahun 2019 perencanaan alokasi dana desa tersebut yang digunakan untuk bagian pertanian adalah sebesar Rp. 241.000.000. dimana dana tersebut masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk belanja pupuk/obat-obatan pertanian sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk pengadaan bibit/induk ternak sebesar Rp. 131.000.000,-. Untuk tahun 2018 alokasi dana desa tersebut yang digunakan untuk bagian pertanian adalah sebesar Rp. 301.997.000. dimana dana tersebut masuk dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk belanja pupuk/obat-obatan pertanian sebesar Rp. 110.000.000,- dan untuk pengadaan bibit/induk ternak sebesar Rp. 191.997.000,-.*

Pertanyaan 7 : Bagaimana cara petani mengembalikan bantuan tersebut?

Jawab : *Tiddak ada pengembalian bantuan modal usaha dari petani, karena mereka tidak diberikan pinjaman modal usaha dari alokasi dana desa.*

Pertanyaan 8 : Apasaja syarat yang harus petani lengkapi untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa tersebut?

Jawab : *Kalau syarata yang harus petani lengkapi untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit di tahun 2018 dan 2019 adalah foto copy KT dan fotocopy KK saja*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan yaitu kepala desa Ie Lhob secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

Pernyataan lain juga di sampaikan oleh Informan lainnya yaitu Bapak Zainal dan Bapak Bapak Rustam kelompok tani di Desa Ie Lhob, hasil kutipan sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana cara aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek di desa ini?

Jawab : *kalau cara aparat desa mnegatur alokasi dana desa untuk pertanian itu dari musyawarah ya, itu waktu tahun 2018 dan 2019, jadi kami ikut musyawarah dan mengusulkan bantuan pupuk dan bibit makanya diadakan bantuan itu bagi petani.*

Pertanyaan 2 : Apakah jumlah alokasi dana desa yang ada tersebut sudah mencukupi untuk membangun desa dalam segala aspek?

Jawab : *Kalau cukup enggaknya bagi pembagunan semua aasepk di desa kami tidak tahu.*

Pertanyaan 3 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani didesa ini?

Jawab : *Kalau peningkatan pertanian sudah cukup di tahun 2018 dan 2019 dari pupuk dan bibit,*

Pertanyaan 4 : Apakah alokasi dana desa tersebut dapat mengembangkan pertanian di desa ini kearah yang lebih baik lagi?

Jawab : *kalau mengembangkan pertanian dari alokasi dana desa belum ya, dikarenakan tahun 2020 sampai sekarang kan tidak ada bantuan apap-apa bagi kami petani dari alokasi dana desa.*

Pertanyaan 5 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi pembangunan sarana pertanian di desa ini?

Jawab : *Pembangunan sarana pertanian tidak ada ya dilakukan baik dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai sekarang tidak ada.*

Pertanyaan 6 : Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi modal usaha petani?

Jawab : *Modal usaha berupa pinjaman dalam bentuk uang bagi petani juga tidak ada.*

Pertanyaan 7 : Bagaimana cara petani mengembalikan bantuan tersebut?

Jawab : *Karena tidak ada bantuan modal usaha bagi petani maka tidak ada pengembalian.*

Pertanyaan 8 : Apasaja syarat yang harus petani lengkapi untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa tersebut?

Jawab : *Kalau syarat bagi kami petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja*

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 kelompok tani secara keseluruhan maka peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggarannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada planning alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak tahu pasti semua tentang jumlah bantuan pertanian, bantuan modal usaha, dan lainnya.

Karena itu semua sudah sepenuhnya urusan pihak desa. Pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian Wawancara

4.3.1 Planning

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada planning alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa jumlah alokasi dana desa di tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah alokasi dana desa di tahun 2018. Selain itu perencanaan pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena anggaran dana bagi petani dari alokasi dana desa akan dikeluarkan sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Sedangkan para petani, mereka tidak mengetahui jumlah alokasi dana desa keseluruhan dan perencanaan untuk pertanian. Semua masyarakat di desa Ie Lhob mendapatkan pupuk sebanyak 20 Kg per KK, jika ada keluarga yang bukan petani maka mereka akan menjual pupuk tersebut kepada para petani.

Berdasarkan salah satu pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli menyebutkan jika administrasi adalah sebuah kegiatan perencanaan. Maka, fungsi administrasi yang pertama adalah fungsi planning atau perencanaan dimana

dalam perencanaan ini dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data kemudian menyusun perencanaan (Siagian, 2014, h.17).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Paulus (2011) dengan judul Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem dan mekanisme akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa.

4.3.2 Organizing

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada organizing alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak mengetahui tentang penyusunan kerja dan kerjasama aparat desa dengan petani mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Ie Lhob. Kalau dari Desa ada penyusunan kerja dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk bidang pertanian. Akan tetapi itu di tahun 2018 dan 2019 sedangkan di tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi karena dananya kurang sudah digunakan untuk penanganan covid-19. Kelompok tani yakin ada penyusunan kerja hanya saja para petani tidak tahu rincian penyusunan kerja tersebut. Kalau kerjasama yang ada dilakukan hanya di tahun 2018 dan 2019.

Fungsi selanjutnya yang juga menjadi pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini adalah menyusun serta membentuk hubungan kerja antara satu pihak dengan pihak lain hingga terwujud kesatuan (Siagian, 2014, h.17).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi (2014) dengan judul Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. Hasil

penelitian diketahui bahwa Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik.

4.3.3 Reporting

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada reporting alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa laporan alokasi dana desa dari pihak desa ke Kecamatan ada di berikan, akan tetapi belum semua desa menyerahkannya, terdapat beberapa desa yang terlambat menyerahkan laporan tersebut karena kendala waktu dan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana tersebut belum memberikan laporan. tidak ada laporan yang diberikan oleh pihak petani kepada desa.

Fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan-keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi ini, pihak yang menerima laporan kegiatan bisa mengetahui dan mendapat gambaran informasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dikerjakan (Siagian, 2014, h.17).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ade (2015) dengan judul Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di kecamatan dolo selatan Kabupaten Sigi. Hasil penelitian diketahui bahwa Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggung jawaban masih merupakan

kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah.

4.3.4 Budgeting

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan pada planning alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak tahu pasti semua tentang jumlah bantuan pertanian, bantuan modal usaha, dan lainnya. Karena itu semua sudah sepenuhnya urusan pihak desa. Pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

Fungsi terakhir ini sebenarnya bisa masuk dalam ramah administrasi namun dalam bidang keuangan. Dimana jika dilihat berdasarkan fungsi administrasi keuangan ini adalah untuk mengelola atau mengatur segala perencanaan tentang anggaran atau keuangan yang digunakan. Pada dasarnya , pengetahuan administrasi keuangan ini hamper sama dengan administrasi perkantoran, namun lebih spesifik dalam fungsi mengatur keuangan (Siagian, 2014, h.17).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Vilmia (2018) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Hasil analisis data menunjuk kan tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di sepuluh desa telah menerap kan asas-

asas Akuntabilitas, prinsip partisipasi dan transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat hadir masyarakat yang cukup partisipatif dalam mengikuti musyawarah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian di lapangan dan didapatkan hasil penelitian yang akurat sesuai dengan data yang diperoleh. Maka peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara:

Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bagian Pertanian Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dilihat dari tahap *planning, organizing, reporting dan budgeting* sudah baik secara teknis maupun administrasi berdasarkan wawancara dengan pihak aparat Desa dan masyarakat, namun dalam hal pertanggung jawaban masih merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah khususnya pihak Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa informan pada *planning* alokasi dana desa maka dapat disimpulkan bahwa pihak kecamatan tidak tahu pasti semua tentang jumlah bantuan pertanian, bantuan modal usaha, dan lainnya. Karena itu semua sudah sepenuhnya urusan pihak desa. Pengaturan keuangan alokasi dana desa untuk pertanian diatur sesuai dengan hasil musyawarah desa bersama aparat desa dan masyarakat, jika usulan untuk dana pertanian baru di susun anggrannya jika tidak ada usulan maka tidak ada anggaran. Pembangunan dan bantuan modal bagi petani tidak ada karena hanya bantuan bibit dan pupuk saja. Persyaratan bagi petani untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit itu hanya fotocopy KK dan KTP saja.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat desa agar dapat mengadakan musyawarah dan tetap memberikan bantuan bagi petani dalam hal pertanian, khususnya bantuan pinjman modal usaha agar pertanian di desa Ie Lhob dapat berkembang dengan baik.
2. Bagi petani diharapkan agar dapat mengikuti musyawarah dan mengusulkan bantuan-bantuan bagi pertanian di desa untuk perkembangan pertanian kedepannya.
3. Kepada Peneliti Lain diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan di Desa yang berbeda dengan variabel yang berbeda seperti partisipasi dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 121-137 ISSN: 2302-2019. Universitas Tadulako
- BPMG. 2019. Rincian Dana Desa di Provinsi Aceh. Aceh
- Budi Setiyono. 2013. Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik, Yogyakarta :Caps
- Dinas Pertanian Aceh Barat Daya, 2020.
- Dwi Martani., dkk. 2014. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta :Salemba Empat.
- Dewi. 2013. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten jember. Jurnal riset akuntansi dan keuangan, 2 (3), 2014, 473-485. Universitas Jember
- Irham Fahmi. 2015. Analisis Laporan Keuangan, Bandung : Alfabeta.
- The Liang Gie, 2014. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty.
- Haris Herdiansyah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hery., 2017. Analisis Laporan Keuangan, Jakarta : Grasindo
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2015. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2015
- Indriantoro, dan Bambang, Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2014. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Julius latumaresa. 2015. Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Made. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
- Mathius Tandiontong. 2016. Kualitas Audit Dan Pengukurannya, Bandung : Alfabeta
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1984. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Paulus. 2011. Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 14 - 24 Universitas Jenderal Soedirman
- Putong. 2015. Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa
- Qanun Aceh Nomor 13, 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh.
- Saibani, 2014, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa,. Jakarta : Media Pustaka.
- Sondang. P, Siagian. 2014. Filsafat Administrasi. Edisi revisi. Jakarta; Bumi Aksara.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. (2012). Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta:PustakaObor Indonesia.
- Muhammad Solekhan. 2014. Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasispartisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Malang: Setara Press.
- Sri Mulyani Indrawati. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu.
- Stewart, Charles J., dan William B. Cash, 2013. Interviu: Prinsip dan Praktek. Jakarta: Salemba Humanika
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung Alfabeta.
- Tulus T.H Tambunan. 2016. Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- The Liang. 2014. Pengantar Manajemen. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa

Vilmia. 2018. Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di kecamatan candipuro kabupaten lumajang. Jurnal akademi akuntansi 2018 Volume. 1 No. 1 / 64 Universitas Muhammadiyah Malang

PEDOMAN WAWANCARA

Planning

1. Berapa jumlah alokasi dana desa yang diterima desa ini di tahun 2020 dan 2021
2. Bagaimana perencanaan alokasi dana desa tersebut di gunakan untuk bagian pertanian?
3. Apa saja perencanaan pembangunan pertanian yang akan dilakukan didesa ini dari alokasi dana desa?
4. Apakah ada perencanaan bantuan modal bagi petani?

Organizing

1. Apakah ada penyusunan kerja untuk pebagian alokasi dana desa ini?
2. Bagaimana cara penyusunan kerja untuk pembagian alokasi dana desa khususnya pada bagian pertanian?
3. Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dengan aparat desa masing-masing dalam pengelolaan alokasi dana desa bagian pertanian?
4. Bagaimana kerjasama yang dilakukan antara aparat desa dengan petani dalam pengelolaan alokasi dana desa ini?

Reporting

1. Apakah ada dilakukan kegiatan pelaporan oleh petani yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa kepada aparat desa?
2. Laporan yang di lakukan petani tentang alokasi dana desa yang digunakan dalam bentuk apa?
3. Apakah laporan dari petani tersebut akan di rekap dan dilaporkan kembali pada aparat kecamatan oleh aparat desa?
4. Apa saja laporan yang di berikan oleh aparat desa kepada aparat kecamatan tentang alokasi dana desa untuk pertanian didesa ini?
5. Apakah aparat kecamatan ada membuat laporan dana dilaporkan ke pementintah Kabupaten?
6. Sejauh ini apakah laporan alokasi dana desa dari setiap desa yang ada di Kecamatan ini sudah lengkap?
7. Apakah ada desa yang sering terlambat memberikan laporan alokasi dana desanya?
8. Desa mana saja yang terlambat dalam memberikan laporan tersebut?
9. Apa kendalanya?

Budgeting

1. Bagaimana cara aparat desa mengatur keuangan alokasi dana desa agar cukup untuk semua aspek di desa ini?
2. Apakah jumlah alokasi dana desa yang ada tersebut sudah mencukupi untuk membangun desa dalam segala aspek?
3. Apakah alokasi dana desa tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani di desa ini?
4. Apakah alokasi dana desa tersebut dapat mengembangkan pertanian di desa ini ke arah yang lebih baik lagi?
5. Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi pembangunan sarana pertanian di desa ini?
6. Berapa jumlah bantuan yang diberikan bagi modal usaha petani?
7. Bagaimana cara petani mengembalikan bantuan tersebut?
8. Apasaja syarat yang harus petani lengkapi untuk mendapatkan bantuan alokasi dana desa tersebut?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Jasmadi, selaku Camat Tangan-tangan



Wawancara dengan Bapak Azhari, SE, selaku Staf Keuangan Kecamatan Tangan-tangan



Wawancara dengan Bapak AA Ubat D, selaku Keuchik Desa Ie Lhob



Wawancara dengan Bapak Rusmali Selaku Kelompok Tani Desa Ie Lhob



Wawancara dengan Bapak Zainal Selaku Kelompok Tani Desa Ie Lhob



Wawancara dengan Bapak Bustami Selaku Kelompok Tani Desa Ie Lhob



Wawancara dengan Bapak Muksin Selaku Kelompok Tani Desa Ie Lhob



Wawancara dengan Bapak Rustam Selaku Kelompok Tani Desa Ie Lhob

